



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW PROVINSI LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JUNANTO HERDIAWAN
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 457538

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	5.350.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 52 m ² /52 m ² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 308 m ² /164 m ² di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 581 m ² /120 m ² di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	1.375.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO JEEP Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
2. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
4. MOBIL, HYUNDAI IONIQ 5 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
5. MOTOR, VESPA S125 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	280.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.359.432.759
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.459.555.356
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	9.823.988.115

**III. HUTANG****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.	2.256.510.555
Rp.	7.567.477.560

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.